



Inventarisasi Ruang Informal Perkotaan Di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bandung

Harry Soeherman^{1✉}, Yohanes Karyadi Kusliansjah², Yasmin Suriansyah³

^{1,2,3}Universitas Katolik Parahyangan

8111801015@student.unpar.ac.id, karyadi@unpar.ac.id, yasmin@unpar.ac.id

Abstract

Informality in urban areas is related to various elements, which can be in the form of social, economic, political, governmental, psychological, social, and, of course, physical elements of the city itself. One of the physical elements of urban informality is space and place, where the existence of behavior and activities is referred to as "informal space." Bandung has grown rapidly as a metropolitan city, both economically and socially. The addition and mobility of the population cause an increase in the need for interaction space, both formally and informally. The Central Government Area of the City of Bandung as a place that has a formal and authoritative character must, of course, be free from conditions of informality that will disrupt the existence of the area. However, in reality, the existence of informal space in the area cannot be eliminated and tends to increase, both in terms of the number of locations and the area covered. The discussion of this paper focuses on inventorying the existence of urban informal spaces, namely in the central government area of the city of Bandung. The purpose of this study is to find out the existence and types of informal activities in the spaces around the central government area of the city of Bandung. The method used is a literature study on informal space and field surveys, which record the time period in which community interaction occurs in using urban space as an informal activity. Through this discussion, it can be concluded that the informality space in the central government area of the city of Bandung is quite diverse in terms of the type of activity and physically occupied areas of the protocol roads that should be free of informal activities.

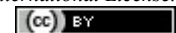
Keywords: *inventory, space, informality, urbanity, government center*

Abstrak

Informalitas di perkotaan memiliki keterkaitan terhadap berbagai unsur, dapat berupa sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, psikologi, kemasyarakatan dan tentunya unsur fisik kota itu sendiri. Salah satu unsur fisik dari informalitas perkotaan adalah ruang dan tempat yang menjadi wadah eksistensi perilaku dan kegiatannya yang disebut sebagai ruang informal (informal space). Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan, telah berkembang dengan pesat baik secara ekonomi, social dan lain-lain. Penambahan dan mobilitas penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang interaksi baik secara formal dan informal. Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bandung sebagai suatu tempat yang memiliki karakter formal dan berwibawa tentunya harus bersih dari kondisi informalitas yang akan mengganggu keberadaan kawasan tersebut. Namun pada kenyataannya, keberadaan ruang informal di kawasan tersebut tidak dapat dihilangkan dan cenderung semakin bertambah, baik jumlah lokasi maupun luasannya. Pembahasan tulisan ini mengkhususkan pada inventarisasi keberadaan ruang-ruang informal perkotaan yaitu di kawasan pusat pemerintahan kota Bandung. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis kegiatan informalitas di ruang-ruang sekitar kawasan pusat pemerintahan kota Bandung. Metode yang digunakan yaitu studi literatur tentang ruang informal dan survei lapangan dengan cara merekam pada periode waktu dimana terjadi interaksi masyarakat dalam menggunakan ruang kota sebagai kegiatan informal. Melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ruang informalitas di kawasan pusat pemerintahan kota Bandung cukup beraneka ragam ditinjau dari jenis kegiatannya dan secara sebaran fisik menempati area-area ruas jalan protokol yang seharusnya bersih dari kegiatan informal.

Kata kunci: inventarisasi, ruang, informalitas, perkotaan, pusat pemerintahan

CEC is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Performa pada era globalisasi pada segi perkotaan tidak hanya mendapat dukungan dan bergantung pada infrastruktur dasar (hard infrastructure) tetapi harus juga mendapat dukungan dengan ketersediaan peningkatan infrastruktur sosial dan komunikasi. Pada wilayah perkotaan. harus memiliki komponen tata ruang yang baik demi tercapainya tata ruang kota yang memiliki pengaruh besar untuk kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin banyak dan pembangun infrastruktur kota yang semakin cepat dapat mengakibatkan intensitas perubahan ini berdampak pada penggunaan lahan menjadi semakin tinggi. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian [1]. "Informal" berarti "tidak resmi" dimana keberadaannya seolah tidak direncanakan,

tidak diharapkan dan bahkan tidak diinginkan. Namun pada realitas kehidupan, situasi dan kondisi informal akan selalu muncul menjadi bagian yang seolah melengkapi kekurangan dimana sistem formal tidak dapat mengakomodir sistem informal [2]. Informalitas merupakan suatu kantong dari sistem formal dan dipahami sebagai sistem marginal yang posisinya terpinggirkan atau bahkan tidak diharapkan, selain itu dikonseptualisasikan sebagai sistem parasit dan merupakan perekat yang menyatukan berbagai bagian dari sistem formal bersama. Informalitas juga dapat didefinisikan sebagai struktur tindakan yang menyiratkan adanya : tempat (rumah, jalan, bisnis) di mana tindakan dilakukan dan aktor, yang melakukan aksinya yang bersifat formal atau informal [3]. Beberapa sisi yang menunjukkan ketimpangan dalam ruang perkotaan dan ruang sosial semakin tampak. Salah satunya ada pada sektor (ekonomi) informal yang berkembang seiring dilaksanakannya modernisasi di perkotaan. Pemerintahan kota harus menekankan kebijakannya pada modernitas; jalan diperlebar, pasar dibangun, pengembangan direncanakan sampai pinggiran, dan perluasan bentuk hiburan yang lebih liberal. Diperkirakan sektor informal hampir tidak mempunyai peranan dalam kerangka yang besar seperti itu, karena sektor ini dianggap mengganggu panorama modern [4]. Menurut UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan berisi aturan mengenai pemenuhan kuota 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari keseluruhan luas Kota [5]. Dalam UU Nomor 26 tahun 2007 juga menjelaskan untuk melakukan penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk mencapai tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia; serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat; dan mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial [6]. Informalitas di perkotaan memiliki keterkaitan terhadap berbagai unsur, dapat berupa sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, psikologi, kemasyarakatan dan tentunya unsur fisik kota itu sendiri. Salah satu unsur fisik dari informalitas perkotaan adalah ruang dan tempat yang menjadi wadah eksistensi perilaku dan kegiatannya yang disebut sebagai ruang informal (informal space). Perkembangan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan sekaligus sebagai Pusat Pertumbuhan Jawa Barat, mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kota menjadi sangat pesat. Kendatipun Pemerintah Kota Bandung telah berusaha mengarahkan dan menata lingkungan melalui penataan ruang, namun arah perkembangan dan pertumbuhan bangunan-bangunan belum terarah dan berkembang sangat sporadis ke arah

seluruh bagian kota. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak dan semakin cepatnya laju pembangunan mengakibatkan intensitas perubahan penggunaan lahan menjadi semakin tinggi [7]. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan, telah berkembang dengan pesat baik secara ekonomi, sosial dan lain-lain. Kota yang sedang mengalami perkembangan pesat baik dari segi infrastruktur kewilayahan maupun sosial-ekonomi [8]. Penambahan dan mobilitas penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang interaksi baik secara formal dan informal. Kota Bandung memiliki rencana strategis yaitu menjadi kota yang mengutamakan pelayanan publik. Rencana Strategi (Renstra) tersebut sangat sesuai terutama dalam konteks reformasi birokrasi serta modernisasi manajemen pengelolaan kota. Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bandung sebagai suatu tempat yang memiliki karakter formal dan berwibawa tentunya harus bersih dari kondisi informalitas yang akan mengganggu keberadaan kawasan tersebut. Namun pada kenyataannya, keberadaan ruang informal di kawasan tersebut tidak dapat dihilangkan dan cenderung semakin bertambah, baik jumlah lokasi maupun luasannya. mayoritas alih fungsi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (94,12%). Sedangkan faktor yang mempengaruhi alih fungsi adalah lokasi yang strategis (69,50%) dan saluran irigasi tidak berfungsi dengan maksimal (30,1%). Alih fungsi ini juga didorong karena ruang terbuka hijau banyak berlokasi di kawasan strategis dengan infrastruktur yang lengkap sehingga menarik masyarakat untuk melakukan alih fungsi, khususnya jika saluran irigasi yang ada tidak bisa difungsikan secara optimal [6]. Untuk memperoleh kesesuaian dengan undang-undang penataan ruang Kawasan perkotaan dengan menunjukkan hasil penelitian dalam pelaksanaan pengawasan penataan ruang di Kabupaten Tegall dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [9]. perencanaan tata ruang kota berkelanjutan perlu direkonstruksi dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan dan sistem pengetahuan masyarakat local [10]. Penelitian kepustakaan atau studi literatur sendiri merupakan penelitian yang hanya berdasarkan kepada karya tertulis, diantaranya hasil penelitian yang telah ataupun yang masih belum terpublikasikan dalam Asy'ari (2021) [11]. Tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan sebagai informasi atau bukti untuk pembahasan. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen dan variabel pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku [12]. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui penjajakan dari berbagai literatur (riset kepustakaan), seperti buku dan jurnal [13]. Ruang publik diharapkan dapat menjadi wadah interaksi sosial budaya warga kota dan bukan sekedar sebagai pelengkap bagi tujuan-tujuan ekonomi dalam

arti sempit. Ruang publik sejati adalah yang menjamin penguasaan bersama oleh khalayak, terbuka untuk interaksi dengan orang asing secara damai, aman, dan majemuk (plural). Adapun penelitian yang meneliti tentang ruang terbuka dirancang sebagai ruang publik formal sebagai bagian dari Kompleks Gedung Sate. Kegiatan yang beragam seperti kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, termasuk keagamaan diselenggarakan di area yang telah dibuatkan, salah satu kegiatan yang terbesar di Indonesia adalah pasar

minggu di Kota Bandung. wacana informalitas dalam formalitas ruang publik menjadi isu penting yang harus ditempatkan pada posisi yang tepat [14]. persepsi umum pedagang terhadap penggunaan ruang publik masih jauh dari yang diharapkan. Para pedagang formal maupun informal berpendapat bahwa trotoar pada koridor jalan halat bisa digunakan secara bebas baik sebagai lahan berdagang ataupun sebagai lahan parkir untuk pelanggannya [15].

Tabel 1. Karakteristik kampung kota berdasarkan sebaran lokasi (zona) kota Bandung

Variabel	Zona Pusat Kota (20 Kampung)	Zona Dalam Kota (228 Kampung)	Zona Pinggiran Kota (464 Kampung)	Kota Bandung
Kepadatan Penduduk (Netto)	60% kampung memiliki kepadatan sedang (200-300 jiwa/Ha)	48% kampung memiliki kepadatan tinggi (> 300 jiwa/Ha)	46% kampung memiliki kepadatan sedang (200-300 jiwa/Ha)	39% kampung Memiliki kepadatan Penduduk sedang
Kepadatan Bangunan (Netto)	55% kampung memiliki kepadatan rendah (<50 bangunan rumah/Ha)	57% kampung memiliki kepadatan sedang (50-100 bangunan rumah/Ha)	64% kampung memiliki kepadatan sedang (50-100 bangunan rumah /Ha)	60% kampung Memiliki kepadatan Bangunan sedang
Status Kekumuhan Kawasan	80% kampung berada di lingkungan kawasan kumuh (radius 0- 250m)	64% kampung berada di lingkungan kawasan kumuh (radius 0-250m)	58% kampung berada di lingkungan kawasan kumuh (radius 0-250m)	60% kampung berada di lingkungan kawasan kumuh
Status Lahan	70% kampung memiliki sejumlah persil dengan status lahan tidak terdaftar	65% kampung memiliki sejumlah persil dengan status lahan tidak terdaftar	28% kampung memiliki sejumlah persil dengan status lahan tidak terdaftar	42% kampung memiliki status lahan tidak terdaftar
Kesesuaian Dengan rencana tata ruang (RDTR)	60% kampung tidak berada pada peruntukan kawasan perumahan menurut RDTR	21% kampung kampung tidak berada pada peruntukan kawasan perumahan menurut RDTR	19% kampung kampung tidak berada pada peruntukan kawasan perumahan menurut RDTR	17% kampung tidak sesuai dengan peruntukan perumahan

Berdasarkan yang disajikan pada Tabel 1, Analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa di Kota Bandung terdapat sekitar 60% kawasan kampung berada di dalam kawasan kumuh, 42% tidak memiliki legalitas (status lahan belum terdaftar) dan 17% tidak sesuai dengan peruntukan lahan perumahan/ yang ditetapkan dalam RDTRK Bandung [16]. Ruang informal yang berkaitan langsung dengan ruang publik memerlukan keterlibatan masyarakat pengguna dalam proses perancangannya. Dengan demikian akan semakin banyak informasi dan masukan untuk diakomodir dan disesuaikan dengan kondisi ruang dan tempat yang kan dirancang [17]. Ruang terbuka publik merupakan elemen kota yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu kota. Aksesibilitas yang tinggi menjadikan ruang ini menjadi tempat bertemunya bermacam aktivitas dari berbagai pengguna [18]. Masyarakat Teluk Dalam telah memiliki kesadaran mengenai konsep tataruang. Mereka mampu menerapkan ide-idenya tentang konsep ruang kota pada peta dasar Kota Teluk dalam konsep-konsep maupun ide-ide yang mereka usulkan berkaitan dengan tataletak/lokasi prasarana dan sarana kota [19]. Bentuk partisipasi masyarakat anatara lain adalah dengan menghadiri rapat sosialisasi, memberikan masukan, memberikan kontribusi tenaga seperti terlibat langsung dalam proses pengecatan, ikut membantu perbaikan rumah yang kondisi rumahnya sudah tak layak, membersihkan sungai dari sampah, penebangan pohon yang sudah mulai mengganggu dan

liar [20]. Strategi peningkatan kualitas bermukim di Kelurahan Nyengseret akan menciptakan keterkaitan antar lingkungan baik melalui keterkaitan ekonomi, sosial maupun budaya (makro) maupun lingkungan fisiknya (mikro), sehingga dapat menciptakan sistem perkotaan dan memberi legitimasi kuat pada eksistensi kampung [21]. Sebagai bahan perbandingan, disajikan gambaran peradaban di Shanghai, kota yang sama-sama mendapat julukan “Paris” (Shanghai - “Paris dari Timur”). Pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung memang masih jauh dari harapan. Sementara itu, Shanghai dapat dipandang sebagai kota berkelanjutan yang berhasil dan dapat menginspirasi kota-kota lain di dunia, termasuk Kota Bandung, terutama dalam hal pembangunan transportasi dan fasilitas publik yang terpadu, inovatif, dan berkelanjutan [22]. Di dalam analisis keberlanjutan mengungkapkan bahwa kota BSD mempunyai kategori kurang berkelanjutan (46,75), kurang dari 50 poin. Hanya dalam aspek seperti infrastruktur dan teknologi (52,20), ekonomi (53,17) dan hukum dan lembaga (59,95) mendekati kategori berkelanjutan. Sementara dalam aspek ekologi (42,22) dan sosial budaya (26,49) kota BSD dikategorikan tidak berkelanjutan. Terdapat 22 faktor pengaruh dan 5 parameter kunci untuk dapat dipertimbangkan kota BSD di dalam mencapai kota yang berkelanjutan. Disarankan kebijakan untuk pengembangan kota berkelanjutan baru harus ada penyediaan teknologi produksibersih, penyediaan fasilitas sistem pembuangan kotoran, pengembangan

jaringan jalan, transportasi umum yang efektif dan efisien, mempertimbangkan budaya lokal, peningkatan lembaga yang sesuai. kata kunci: kota baru, kualitas air dan udara, system pembuangan kotoran, model, strategi, dan kebijakan [23]. untuk mengevaluasi kualitas dari Taman Lansia Kota Bandung berdasarkan fungsi ekologis agar terwujudnya penataan taman kota yang mampu meningkatkan kualitas ruang perkotaan secara berkelanjutan. Ada pun fungsi ekologis yang di analisis adalah fungsi penahan kebisingan, fungsi modifikasi suhu, fungsi pengontrol kelembapan udara, fungsi penahan angin, fungsi pengatur tata air dan peyangga tanah dan fungsi sebagai habitat satwa. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Kesesuaian Fungsi Ekologis Berdasarkan Vegetasi menggunakan metode analisis Key Performances Index (KPI), Penilaian Kondisi Lingkungan. dan Analisis deskriptif Fungsi Taman Kota sebagai habitat satwa. Berdasarkan hasil analisis, Kondisi Vegetasi pada Taman Lansia dari ke lima (5) fungsi ekologis, tiga (3) yang termasuk ke dalam kategori baik, sementara untuk Pengukuran kondisi lingkungan pada Taman Lansia dari ke lima (5) fungsi dua (2) fungsi yang memenuhi kondisi ideal. Berdasarkan hasil analisis fungsi taman kota sebagai habitat satwa menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis satwa pada taman kota diantaranya [24]. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh suatu pertanyaan bagaimana perwujudan informalitas dalam arsitektur, dapat ditelaah melalui pengertian tentang ruang dan tempat sebagai media yang merealisasikan wujud arsitektur di dalamnya. Untuk itu, unsur ruang yang diartikan sebagai ruang informal menjadi fokus dalam pembahasan ini, karena ruang informal berkaitan langsung sebagai elemen fisik yang menjadi unsur utama dalam tatanan arsitektur.

2. Metodologi Penelitian

Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan terkait latar belakang dengan topik yang dikerjakan, melakukan perumusan masalah, memperhatikan batasan masalah, menentukan tujuan penelitian dan menemukan manfaat penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan studi literatur tentang ruang informal dan survei lapangan dengan cara merekam pada periode waktu dimana terjadi interaksi masyarakat dalam menggunakan ruang kota sebagai kegiatan informal. Tahapan selanjutnya yaitu studi literatur untuk melakukan pendalaman teori yang berkaitan dengan topik yang digunakan dalam penelitian ini. Pendalaman materi yang dicari terkait judul ini tentang inventarisasi ruang informal perkotaan. Penelitian yang penulis lakukan perencanaan inventarisasi ruang informal perkotaan di Kota Bandung oleh arsitektur dengan basis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku-buku, ataupun berita yang sudah ada seputar literatur yang berkaitan dengan penelitian

ini. Tahapan selanjutnya terkait penulis mempertimbangkan apa saja yang perlu direncanakan dan disiapkan untuk mengetahui keberadaan dan jenis kegiatan informalitas di ruang-ruang sekitar kawasan pusat pemerintahan kota Bandung. Pada tahapan proses pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang perlu dilakukan peneliti adalah melakukan review dari beberapa literatur mengenai ruang informal, serta survei lapangan dengan cara merekam pada periode waktu dimana terjadi interaksi masyarakat dalam menggunakan ruang kota sebagai kegiatan informal. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh dari seputar literatur yang berkaitan dengan ruang informal. Sementara survei lapangan merupakan tahapan penentu pada penelitian ini, dengan pengambilan data lapangan di area studi secara langsung. Tahapan terakhir yaitu memperoleh hasil penelitian dengan mendapatkan beraneka ragam ditinjau dari sudut pandang penulis dan sumber data yang mendukung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ruang Informal Sebagai Ruang Publik

Ruang informal di perkotaan merupakan wadah interaksi sosial bagi publik. Dengan demikian ruang informal merupakan ruang publik dimana keberadaannya merupakan kebutuhan utama yang perlu dipenuhi dalam proses perancangan arsitektur perkotaan. Ruang publik perkotaan menjadi aspek yang sangat menentukan karena kehidupan keseharian dan kehidupan sosial terjadi di ruang publik. Dalam pengertian yang paling umum, ruang publik dapat berupa taman, tempat bermain, jalan, atau ruang terbuka. Ruang publik kemudian didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala. Dalam pengertian yang lebih luas, bila dikaitkan dengan kehidupan keseharian warga kota, pengertian ruang publik juga termasuk angkutan umum, halte, jalan, trotoar dan jalur aksesibilitas lainnya, pasar, halaman bangunan umum seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran yang melayani kepentingan publik.

3.2. Ruang Informal Sebagai Unsur Yang Perlu Disertakan Dari Awal Dalam Rancangan Arsitektur Perkotaan

Agar tidak menjadi keadaan yang tidak terkendali dan menjadi "parasit" dalam tatanan ruang perkotaan, maka ruang informal yang merupakan manifestasi dari informalitas perlu dilibatkan sebagai bagian dari proses perancangan arsitektur perkotaan. Dengan demikian perlu ada perubahan paradigma informalitas dari unsur yang "negatif" menjadi kriteria dan potensi pada suatu rancangan perkotaan sebagai berikut :

- a. Informalitas tidak terkait dengan kemiskinan, marginalistas, tetapi [semakin diterima] sebagai cara alternatif dalam rancangan perkotaan.
- b. Informalitas tidak harus diambil sebagai langkah transisi ke formalitas
- c. Informalitas kota “muncul di bawah paradigma pembebasan” yang perlu diterapkan sebagai bagian kebutuhan masyarakat kota dalam berinteraksi dan berekspresi dalam ruang publik.
- d. Informalitas urban juga sebagai cara hidup, yaitu sebagai unsur dasar cara pandang masyarakat kota dalam menjalani kehidupan di perkotaan yang terdiri dari berbagai tingkat lapisan strata sosial dan ekonomi.

Sehingga dalam proses pembuatan ruang informal perlu juga disertakan dari awal pembahasan terkait kawasan kampung di kota Bandung yang dikhawatirkan nanti nya akan menjadi kendala, ataupun bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan dalam rancangan arsitektur perkotaan. Dalam penelitian kustiwan menjelaskan bahwa rangka mewujudkan pembangunan (kota) yang inklusif, diperlukan beberapa upaya diantaranya meningkatkan partisipasi dan inovas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh arsitektur perkotaan dalam menerapkan perencanaan kota yang lebih inklusif dan desain ramah lingkungan yang peka terhadap kebutuhan, anak-anak, kaum muda, perempuan, keluarga, kaum lanjut usia dan difabel serta memperkuat peran kampung-kampung perkotaan sebagai tempat usaha informal rakyat yang disinergikan dengan ekonomi formal kota melalui insentif pasar dan kebijakan ekonomi perkotaan yang lebih inklusif bagi kelompok sosial yang selama ini masih kurang mendapatkan kesempatan.

3.3. Ruang Informal Sebagai Proses Partisipatif Masyarakat Dalam Memberi Masukan Bagi Perancangan Arsitektur Perkotaan

Perancangan ruang publik seperti sarana transportasi (halte, stasiun, bandara, pelabuhan), ruang terbuka hijau (taman, kolam, lapangan olah raga) dan lain-lain merupakan elemen arsitektur sebagai perwujudan nyata dari ruang informal dalam konteks perkotaan. Partisipatif masyarakat dalam memberikan masukan bagi perancangan arsitektur perkotaan cukup penting untuk perancangan ruang informal yang nantinya akan digunakan masyarakat.

4. Kesimpulan

Informalitas perkotaan merupakan perpaduan berbagai unsur mulai dari sosial, kemasyarakatan, ekonomi, politik dan unsur fisik ruang dalam bentuk ruang informal. Informalitas perkotaan secara fisik merupakan ruang informal dalam bentuk ruang dan tempat yang secara konseptual berpotensi untuk dijadikan salah satu kriteria dalam proses perancangan arsitektur perkotaan. Dalam mewujudkan manifestasi

arsitektur dalam informalitas perkotaan diperlukan adanya perubahan paradigma tentang informalitas dan proses partisipatif dari masyarakat dalam proses perancangan ruang publik perkotaan.

Daftar Rujukan

- [1] S. Fransisca and R. N. Putri, “Pemanfaatan Teknologi RFID untuk Pengelolaan Inventaris Sekolah Dengan Metode (R&D),” *J. Mhs. Apl. Teknol. Komput. dan Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 72–75, 2019.
- [2] H. Hamid, “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.” De La Macca, 2018.
- [3] M. S. Laguerre, *The informal city*. Springer, 2016.
- [4] I. Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20,” *J. Seji.*, vol. 1, no. 2, 2018.
- [5] T. E. Prasetyo, “Pengelolaan Ruang Publik Di Kota Surakarta,” 2010.
- [6] I. N. Riana, W. Widiastuti, and I. B. G. Primayatna, “Kajian Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar,” *SPACE*, vol. 1, no. 1, 2014.
- [7] D. Yudianingrum, “Evaluasi Dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Zona Riparian sungai Surabaya.” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.
- [8] B. Sutrisno and I. Akbar, *E-partisipasi dalam pembangunan lokal (Studi implementasi smart city di Kota Bandung)*. Bandung Institute of Technology, 2018.
- [9] W. Yudi, “Peran Dinas Perkimtaru Dalam Pengawasan Tata Ruang Permukiman Di Kabupaten Tegal.” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- [10] T. Nazaruddin and M. Manfarisyah, “Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal,” in *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 2018, vol. 2, no. 1.
- [11] R. Asy’ari, R. D. Dienaputra, A. Nugraha, R. Tahir, C. U. Rakhman, and R. R. Putra, “Kajian konsep ekowisata berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata: Sebuah studi literatur,” *Pariwisata Budaya J. Ilm. Agama dan Budaya*, vol. 6, no. 1, pp. 9–19, 2021.
- [12] M. Melfianora, “Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur,” *Open Sci. Framew.*, vol. 12, no. 1, pp. 14–26, 2019.
- [13] J. W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [14] R. R. D. Damajani, “Informalitas Dalam Formalitas Pada Ruang Terbuka Publik (Studi Kasus Lapangan Gasibu, Bandung),” *Dimens. (Journal Archit. Built Environ.*, vol. 35, no. 2, pp. 164–171, 2007.
- [15] A. Nasution and E. L. Nababan, “Kajian Persepsi Pedagang Formal Dan Informal Terhadap Penggunaan Ruang Publik (Studi Kasus: Koridor Jalan Halat, Medan),” *Jur. Arsitektur, Medan FT USU*, 2018.
- [16] I. Kustiwan and A. Ramadhan, “Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung,” *J. Reg. Rural Dev. Plan. (Jurnal Perenc. Pembang. Wil. Dan Perdesaan)*, vol. 3, no. 1, pp. 64–84, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.64-84>.
- [17] M. J. Rahayu, *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan yang Berkeadilan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [18] D. Hantono, “Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka Publik,” *NALARs*, vol. 18, no. 1, pp. 45–56, 2019.

- [19] S. Sukawi, "Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana Studi kasus Kota Teluk Dalam Nias Selatan," *Local Wisdom J. Ilm. Kaji. Kearifan Lokal*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2010.
- [20] A. F. Jauhari and P. Astuti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kampung Pelangi di Kota Semarang," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 291–300, 2018.
- [21] Nugraha, Yudhistyra & Nugraha, Muhammad & Abdillah, Alien. (2021). Analisis Strategi Peningkatan Kualitas Bermukim Di Kampung Padat Perkotaan (Studi Kasus Kampung Kota Nyengseret). *Agora: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti*. 19. 12-21. <http://dx.doi.org/10.25105/agora.v19i1.9771>
- [22] Sobarna, Cece. (2020). Bandung Menuju Kota Untuk Semua : Harapan Dan Kenyataan Yang Selaras Dengan Sdgs. *Metahumaniora*. 10. 295. <http://dx.doi.org/10.24198/metahumaniora.v10i3.30494>
- [23] Hadi, Syamsul & Pramudya, Bambang & Sutjahjo, Surjono & Hadi, Setia. (2016). Model Pengendalian Lingkungan Dalam Pembangunan Kota Baru Berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 13. 1. <http://dx.doi.org/10.29122/jtl.v13i1.1400>
- [24] Nurhasan, Alma & Damayanti, Verry. (2022). Evaluasi Fungsi Ekologis Taman Kota dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Perkotaan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. 1. 149-158. <http://dx.doi.org/10.29313/jrpk.v1i2.479>